

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam maupun non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Faktor alam (natural hazards) dan faktor non alam atau manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation) serta elemen-elemen dari berbagai komponen di dalam masyarakat (UNISDR, 2009).

Klasifikasi ini juga diperkuat dalam dokumen perencanaan kebencanaan nasional seperti Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2024 yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap berbagai jenis ancaman dalam upaya pengurangan risiko bencana (BNPB, 2012; BNPB, 2020). Lebih lanjut, Wisner et al. (2004) serta Alexander (2002) menjelaskan bahwa bencana tidak hanya bersumber dari ancaman fisik, namun juga dari kerentanan sosial masyarakat yang kompleks, yang menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang rawan bencana alam terutama pada kelompok dan permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang dimaksud adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi permasalahan rutin yang terjadi hampir setiap tahun khususnya pada musim kemarau (CIFOR, 2015; KLHK, 2021). Selain itu, ketika musim penghujan, beberapa wilayah diresahkan dengan permasalahan banjir serta erosi. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat menghasilkan polusi asap hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik lokal hingga masyarakat kawasan

Asia Tenggara terutama Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam (BNPB, 2020). Kebakaran hutan dan lahan meningkatkan konsentrasi green house gases sehingga secara tidak langsung memperburuk situasi perubahan iklim, sehingga Indonesia menjadi sorotan dunia dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Secara langsung, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), gangguan penglihatan dan menimbulkan gangguan akses transportasi baik darat maupun udara. Karakter kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat spesifik karena sebagian besar berada di lahan gambut yang sangat potensial menimbulkan asap (BPBD Kalimantan Tengah, 2022).

Tahun 2022 mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Bidang Kedaruratan dan Logistik, ini menjadi lebih tertantang dikarenakan Kabupaten Kotawaringin Barat sering terjadi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan dan terjadi banjir hal ini tidak menyurutkan tekad dan semangat sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Sebagai tenaga perawat dan merangkap tenaga struktural tupoksi selama berdinasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ikut serta dalam rangkaian kegiatan selama terjadi bencana, dan tahun 2022 di mulai bulan februari dan bulan terjadi kejadian bencana karhutla, bulan Juni terjadi bencana banjir di beberapa wilayah yang lokasi daerahnya lebih rendah dari permukaan tanah, yaitu wilayah Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan. Puncak dari bencana banjir di bulan Oktober hingga mencapai ketinggian 2 meter hal ini berlangsung sampai bulan Nopember 2022.

Ikut serta dalam penanganan bencana merupakan langkah penting yang tidak hanya berfokus pada aksi tanggap darurat, tetapi juga mencakup proses evaluasi secara menyeluruh, seperti pendataan dan analisis terhadap korban banjir untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan tepat. Setelah itu, kegiatan pencatatan dan dokumentasi pelajaran dari setiap kegiatan kebencanaan menjadi sangat penting, agar pengalaman yang diperoleh dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penanganan bencana di masa mendatang. Dengan demikian, setiap keterlibatan dalam penanganan bencana tidak hanya sebatas aksi cepat, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas, memperbaiki strategi, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Berdasarkan letak administratif berbatasan dengan 3 Kabupaten yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2002 Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu : Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 81 Desa.

**Tabel 1.1.**  
Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	LUAS		KELURAHAN	DESA
		(Km <sup>2</sup> )	%		
1.	Kotawaringin Lama	1.219,83	11,32	2	15
2.	Arut Selatan	2.342,66	21,77	7	13
3.	Kumai	2.915,05	27,09	3	14
4.	Pangkalan Banteng	1.311,73	12,19	-	17
5.	Pangkalan Lada	284,73	2,65	-	11
6.	Arut Utara	2.685,00	24,96	1	10
<b>Kotawaringin Barat</b>		<b>10.759,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13</b>	<b>81</b>

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Kejadian-kejadian bencana tersebut ada yang menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian fisik serta kerusakan lahan yang tidak sedikit. Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dan data kejadian bencana yang dirangkum oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 2019 – 2022 tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung (cuaca ekstrem), gelombang ekstrem, kebakaran hutan, Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022 tercatat

7 (tujuh) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Salah satu Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi kelas Risiko tinggi, yang menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kotawaringin Barat**

NO	JENIS BENCANA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	Banjir	23,12	Tinggi
2.	Gempa Bumi	6,94	Sedang
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	23,12	Tinggi
4.	Tanah Longsor	7,74	Sedang
5.	Kekeringan	7,71	Sedang
6.	Cuaca Ekstrem	8,73	Sedang
7.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	15,41	Tinggi

*Sumber: Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2022*

Selama ini bencana alam selalu dipandang sebagai suatu hal yang berada diluar control manusia, oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang rawan bencana alam sebagai akibat dari penurunan kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang dimaksud adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 195/Kpts-II/1996 yaitu suatu keadaan dimana hutan dilalap api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumberdaya hutan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi hampir setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2023 kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat **685 jumlah Titik Panas** terpantau melalui (*Satelit LAPAN Fire Hotspot*), dengan jumlah **luas areal yang terbakar 24.456 hektar**, dengan **jumlah**

*hari pemadaman selama 285 hari.*

Data kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2015 – 2023 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.3 . Data Kebakaran Hutan dan Lahan Periode tahun 2015-2023

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah Kejadian</u>	<u>Luas Lahan Terdampak (Ha)</u>	<u>Luas Lahan yang Ditangani (Ha)</u>
2015	206	22.206	2.926
2016	24	352	203
2017	2	4	4
2018	18	154	108
2019	192	418	230
2020	47	80	72
2021	43	427	189
2022	24	160	75
2023	138	674	333

*Sumber : BPBD Kotawaringin Barat*

Secara umum kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu kondisi bahan bakar, cuaca dan sosial budaya masyarakat. Kondisi bahan bakar yang rawan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah jumlahnya yang melimpah dilantai hutan, kadar airnya relatif rendah (kering), serta ketersediaan bahan bakar yang berkesinambungan.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat karena kurangnya keterampilan, sarana dan prasarana dan kelembagaan pada tingkat desa. Oleh karena itu keberadaan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan keterlibatannya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan mutlak diperlukan sebagai ujung tombak. Keberadaan masyarakat pada setiap lini pedesaan merupakan potensi besar yang harus dikelola secara serius dan dapat dijadikan program strategis daerah dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana karhutla. Bencana alam khususnya karhutla pasti menjadi hal yang tidak diinginkan semua orang, yang pastinya dapat terjadi secara tiba-tiba tidak tahu

kan waktunya. Namun suatu bencana alam dapat diminimalisir dampaknya melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa pengertian Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Untuk memaksimalkan mitigasi dan penanganan bencana karhutla Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus berani membuat terobosan. Terobosan yang dimaksud harus mengedepankan peran serta masyarakat melalui kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada setiap desa untuk melakukan tindakan dini mencegah dan mengendalikan kebakaran di desa mereka masing-masing. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 10.759 KM<sup>2</sup> terbagi atas 6 (enam) kecamatan adalah wilayah yang sangat luas, sampai dengan saat ini *Coverage Area* yang mampu diampu oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik yang sebagian tupoksinya penanganan Karhutla baru terbatas pada 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, dimana pada 2 Kecamatan tersebut, tingkat kerawanan kejadian karhutla sangat tinggi.

Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah elemen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan investasi di Daerah. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat membantu mengurangi risiko kebakaran serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Berikut adalah beberapa kaitan antara partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan investasi di daerah:

#### **1. Kondisi Lingkungan yang Stabil:**

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dapat membantu mencegah kebakaran yang merusak hutan dan lahan. Ini berarti lingkungan di daerah tersebut tetap stabil dan berkelanjutan. Investasi sering kali memerlukan kondisi lingkungan yang baik untuk berkembang, dan daerah yang bebas dari risiko kebakaran dapat menjadi daya tarik bagi investor.

#### **2. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perkebunan:**

Banyak investasi di daerah pedesaan terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan. Pengendalian kebakaran hutan membantu melindungi lahan pertanian dan perkebunan dari kerusakan akibat kebakaran. Ini berarti hasil pertanian dan produksi perkebunan dapat dijaga dengan baik, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk-produk tersebut.

### **3. Kerjasama dengan Investor Swasta:**

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengendalian kebakaran hutan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi investor swasta yang berorientasi pada praktik bisnis yang berkelanjutan untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investor seringkali mencari peluang di daerah yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

### **4. Promosi Pariwisata:**

Daerah yang bebas dari risiko kebakaran hutan cenderung lebih menarik bagi industri pariwisata. Pariwisata adalah bentuk investasi yang signifikan, dan kebakaran hutan dapat merusak daya tarik wisata alam suatu daerah. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengendalian kebakaran dapat secara tidak langsung mendukung industri pariwisata dan investasi terkait.

### **5. Peningkatan Kualitas Hidup:**

Pengendalian kebakaran hutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Masyarakat yang merasa aman dari ancaman kebakaran cenderung lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah mereka. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi investasi dan pengembangan bisnis.

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus didukung oleh peran pemerintah yang kuat, kebijakan yang mendukung praktik-praktik berkelanjutan, dan kerjasama antara pihak berkepentingan yang beragam, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, investasi di daerah tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan, seiring dengan upaya untuk menjaga lingkungan yang sehat dan aman dari kebakaran hutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanggulangan bencana di daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati Kotawaringin Barat dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang didirikan berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 56 (lima puluh enam) orang Pegawai sebagaimana data berikut :

**Tabel : 1.4 Data Pegawai Per 31 Desember 2022**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			L	P	S2	S1	D3	SMA	SMP	PNS/CPNS	TKD
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1		1					1	
2	Jabatan Administrator										
	Administrator	4	3	1	1	3				4	
	Pengawas	1		1				1		1	
	Pelaksana	43	32	11		7	3	32	2	16	27
3	Jabatan Fungsional	7	4	3	1	5	1			7	
	Jumlah	56	40	16	3	15	4	33	2	29	27

Dari Jumlah pegawai orang tersebut pegawai yang benar-benar bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat penanganan bencana hanya berjumlah 27 orang yang harus melayani 81 Desa dan 13 Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat. Berdasarkan perihal tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan agar tetap terjaga dan kondusif. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan sering kali menemui hambatan terutama dalam jumlah personel yang dimiliki oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebab jumlah personel Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dimana ke-27 orang tersebut 1 (satu) orang pada jajaran pejabat struktural Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan 26 (dua puluh enam) orang personel lapangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu, dimana pada saat bersamaan memiliki tugas untuk menjaga Markas Komando Penanggulangan Bencana. Sampai tahun 2023 ini.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugasnya masih belum didukung penuh oleh peran serta masyarakat sebagai pemilik kepentingan dari pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kurangnya dukungan masyarakat tersebut disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya kesadaran kelompok masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta minimnya peralatan dan mahalnnya harga peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
2. Keterbatasan anggaran pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
3. Belum terbentuknya forum pengurangan resiko bencana;
4. Belum terbentuknya desa Tangguh Bencana;
5. Belum terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA);

Penanganan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan secara optimal, karena ada tugas dan fungsi yang belum terlaksanakan secara efektif dan efisien, khususnya keterlibatan masyarakat didalamnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Minimnya pengetahuan Masyarakat tentang cara penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya aktifitas Masyarakat yang tidak ramah lingkungan;
3. Minimnya peralatan dan mahalnnya harga peralatan penanggulangan bencana khususnya alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
4. Kurangnya kesadaran kelompok Masyarakat terhadap ancaman bencana khususnya bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Langkah strategis yang akan dibangun sebagai pendekatan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi penulis mengacu pada 8 jenis Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) yaitu ; inovasi proses, inovasi metode, inovasi produk, inovasi konseptual, inovasi teknologi, inovasi struktur organisasi, inovasi hubungan dan inovasi pengembangan sumber daya manusia, salah satu yang dapat diaplikasi dengan Masyarakat yaitu dengan menggunakan inovasi Sumber Daya Manusia (HRD INNOVATION), dengan dasarnya pengembangan SDM dapat berlangsung secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi individual.

Hendaknya inovasi ini dipandu oleh suatu kebijakan internal organisasi. Kebijakan ini menysasar pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan. Dengan demikian, inovasi SDM dapat diartikan sebagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM).

Penulis membuat inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan informasi tentang kebencanaan melalui Pojok Siaga Bencana berupa leaflet dan edukasi melalui pertemuan di tingkat desa.

## **B. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan**

### **1. Ruang Lingkup Kinerja**

Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana, Petugas Kesehatan (Penulis) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan aspek kesehatan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada fase pra-bencana. Ruang lingkup kinerja petugas kesehatan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, advokasi, serta pembinaan terkait kesehatan dan keselamatan dalam situasi darurat.

Peran seerta ini mencakup kegiatan penyuluhan tentang pentingnya kesiapsiagaan kesehatan, pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat, serta penyusunan dan sosialisasi rencana kontinjensi berbasis komunitas. Petugas kesehatan juga berkontribusi dalam penguatan sistem deteksi dini dan

mekanisme respon cepat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) yang dapat terjadi pasca-bencana. petugas kesehatan turut menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi lokal untuk membangun kesadaran kolektif serta menumbuhkan budaya tanggap bencana. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, petugas kesehatan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam simulasi evakuasi, penyusunan peta risiko kesehatan, serta identifikasi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dengan demikian kinerja petugas kesehatan BPBD tidak hanya berfokus pada penanganan dampak bencana, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam membangun ketangguhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program kesiapsiagaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat merupakan komponen vital dalam menciptakan ketangguhan terhadap bencana, dan Penulis berperan sebagai fasilitator, penggerak, serta pendamping dalam upaya tersebut.

1. Edukasi dan Sosialisasi Kebencanaan

BPBD secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai jenis-jenis bencana, risiko yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah mitigasi dan evakuasi yang harus diketahui masyarakat. Kegiatan ini mencakup: penyuluhan langsung ke Desa/Kelurahan, Edukasi melalui media social, radio dan leaflet, Kegiatan “BPBD Goes to School”

2. Pelatihan dan Simulasi Kesiapsiagaan

Untuk membangun kemampuan praktis Masyarakat dalam menghadapi bencana, BPBD menyelenggarakan : Pelatihan dasar penanggulangan bencana, Simulasi evakuasi bencana Bersama Masyarakat, Sekolah dan Instansi.

3. Pembentukan dan Penguatan Forum/Komunikasi Siaga Bencana

BPBD memfasilitasi pembentukan forum pengurangan risiko bencana di tingkat lokal seperti : Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Kelurahan Siaga Bencana (KSB), Forum Relawan Penanggulangan Bencana.

4. Pemetaan Risiko dan Penyebaran Informasi Awal

BPBD melibatkan Masyarakat dalam kegiatan pemetaan risiko bencana

secara partisipatif serta menyebarkan peta rawan bencana dan memberikan informasi peringatan dini dan rencana kontijensi.

#### 5. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan LSM

BPBD bekerjasama dengan pihak luar untuk memperluas jangkauan edukasi dan ketelibatan Masyarakat melalui Program pengabdian Masyarakat kampus dan kegiatan kemanusiaan Bersama LSM dan mitra internasional.

#### 6. Monitoring dan Evaluasi

BPBD bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas program-program kesiapsiagaan bencana yang melibatkan partisipasi Masyarakat. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan serta melakukan penyesuaian strategi guna meningkatkan partisipasi Masyarakat dimasa mendatang.

### 2. Inovasi

Sebagai upaya inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kesiapsiagaan bencana, petugas kesehatan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat menginisiasi pembentukan **“Pojok Siaga Bencana”**. Pojok ini berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan terkait kesiapsiagaan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Pojok Siaga Bencana dirancang sebagai ruang interaktif di fasilitas umum seperti balai desa, posyandu, atau puskesmas, yang dilengkapi dengan berbagai media edukasi, seperti poster, leaflet, video pendek, dan simulasi alat pertolongan pertama. Melalui pojok ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan praktis tentang langkah-langkah kesiapsiagaan, mitigasi risiko, serta tindakan kesehatan darurat yang perlu dilakukan saat bencana terjadi. juga berfungsi sebagai pusat pelatihan kecil bagi masyarakat, khususnya kader kesehatan dan relawan desa, untuk mengasah keterampilan pertolongan pertama, pengelolaan kebersihan lingkungan pasca-bencana, serta pemantauan dini kondisi kesehatan masyarakat rentan.

Penulis sebagai petugas Kesehatan BPBD secara rutin melakukan

pendampingan dan pembinaan di Pojok Siaga Bencana, sekaligus menjangkau aspirasi serta kebutuhan masyarakat terkait penanggulangan bencana. Dengan pendekatan ini, peran serta masyarakat tidak hanya bersifat pasif, tetapi berkembang menjadi aksi nyata dan berkelanjutan. Inovasi Pojok Siaga Bencana menjadi media efektif dalam membangun budaya sadar bencana sekaligus memperkuat jaringan kesiapsiagaan berbasis komunitas di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan demikian, BPBD bersama petugas kesehatan mampu mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kesiapan, dan mengurangi risiko dampak bencana secara signifikan.

### **C. Tujuan Tugas Akhir Program RPL**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum peran serta Petugas Kesehatan (Penulis) untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program kesiapsiagaan bencana melalui penguatan kapasitas kesehatan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu mengenali risiko bencana, memahami langkah-langkah kesiapsiagaan yang tepat, serta mampu melakukan tindakan preventif dan responsif yang efektif dalam menghadapi situasi darurat. Dengan keterlibatan aktif petugas kesehatan, diharapkan terbentuk komunitas yang tangguh, sehat, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana demi terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **2. Tujuan khusus**

- a. Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan kesehatan dalam menghadapi bencana melalui penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan BPBD.
- b. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelatihan pertolongan pertama dan tindakan kesehatan dasar sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.
- c. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok siaga bencana di tingkat desa/kelurahan yang berfokus pada aspek kesehatan dan keselamatan.

### **D. Manfaat Tugas Akhir Program RPL**

#### **1. Bagi Universitas**

- a) Sebagai bahan referensi akademik dalam pengembangan ilmu kebencanaan, manajemen bencana dan pemberdayaan Masyarakat

- b) Menambah kontribusi karya kinerja berbasis pengalaman kerja khususnya dalam konteks pembelajaran berbasis praktik di lapangan (experiential learning)
- c) Mendukung pelaksanaan program RPL dengan contoh nyata pemanfaatan pengalaman kerja untuk menghasilkan kajian terstruktur
- d) Penguatan kemitraan strategi dengan kolaborasi antara Universitas dan BPBD dalam pelaksanaan karya kinerja, dengan adanya magang bagi mahasiswa atau program pengabdian Masyarakat yang lebih terarah.

## 2. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- a) Peningkatan efektivitas Program kesiapsiagaan bencana, Rekomendasi dan inovasi yang dihasilkan dapat menjadi panduan praktis bagi BPBD untuk merancang program yang lebih tepat sasaran, menarik, dan berkelanjutan, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
- b) Meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan fungsinya di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- c) Mendukung Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kegiatan deteksi dini dan cegah dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan/Desa dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- e) Tersedianya informasi yang cepat dan terukur sebagai bahan analisa dan evaluasi tindak lanjut apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan
- f) Basis data dan kebijakan yang lebih baik untuk penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dengan menyediakan data dan informasi yang valid sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik serta pengembangan rencana strategi BPBD di masa mendatang
- g) Menjadi dasar penguatan Kerjasama dengan institusi Pendidikan untuk pelatihan, riset terapan, dan pengembangan kapasitas relawan atau komunitas siaga bencana.
- h) Peningkatan Akuntabilitas dan Citra Publik, dapat meningkatkan

kepercayaan publik dan citra BPBD sebagai Lembaga yang responsive dan kolaboratif.

3. Bagi Mahasiswa

- a) Mendapatkan pengakuan akademik atas pengalaman kerja yang telah dijalani melalui proses ilmiah yang terstruktur.
- b) Meningkatkan kapasitas analisis dan refleksi diri terutama dalam menilai peran profesional dalam bekerja di BPBD.
- c) Menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik dan praktis yang dapat digunakan untuk pengembangan karir lebih lanjut.
- d) Meningkatkan kesadaran kritis dan empati social khususnya dalam melihat pentingnya partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana.